Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 14177-14185

Analisis Literatur Dampak Ketidakstabilan Kebijakan Kurikulum terhadap Pemerataan dan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar Daerah Terpencil

Misbahul Jannah[1], Difa Maulidya[2], Annis Noruzzaini[3], Rif'atul Ajizah[4]
[1,2,3,4]Universitas Sapta Mandiri
Corresponding Author: Misbahul Jannah, E-Mail: misbah28@univsm.ac.id

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Ketidakstabilan kebijakan kurikulum pendidikan nasional dalam satu dekade terakhir menghadirkan tantangan besar dalam implementasi pembelajaran di sekolah dasar, terutama di daerah terpencil. Pergantian kurikulum secara berulang menimbulkan terputusnya kesinambungan program pembelajaran, kesenjangan penyediaan sumber daya pendidikan, serta rendahnya kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan perubahan yang terjadi. Dampak tersebut secara langsung memengaruhi pemerataan akses pendidikan dan menurunkan mutu pembelajaran di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketidakstabilan kebijakan kurikulum terhadap pemerataan dan mutu pembelajaran di sekolah dasar daerah terpencil serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 8 artikel nasional dan internasional terindeks periode 2015–2024 yang dianalisis melalui matriks tematik untuk mengungkap pola dan kesamaan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instabilitas kebijakan kurikulum memperlebar ketimpangan kualitas pembelajaran antar wilayah, menurunkan kesiapan guru dalam adaptasi kurikulum, dan melemahkan kemampuan sekolah dalam memenuhi tuntutan sarana pembelajaran. Sekolah di daerah terpencil terbukti paling terdampak karena keterbatasan pelatihan, fasilitas digital, dan pendampingan akademik. Penelitian menegaskan perlunya konsistensi kebijakan kurikulum serta strategi implementasi berbasis konteks lokal agar transformasi pendidikan berjalan efektif dan merata.

Kata Kunci: kebijakan kurikulum, pemerataan pendidikan, mutu pembelajaran, sekolah dasar, daerah terpencil.

ABSTRACT

The instability of national education curriculum policies in the past decade presents major challenges in the implementation of learning in primary schools, especially in remote areas. Repeated curriculum changes cause a disruption in the continuity of learning programs, gaps in the provision of educational resources, and low readiness of teachers in understanding and implementing the changes that occur. This impact directly affects the equitable distribution of access to education and reduces the quality of learning in areas that are geographically difficult to reach. This study aims to analyze the impact of curriculum policy instability on the equity and quality of learning in elementary schools in remote areas and identify supporting and inhibiting factors in the implementation process. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) of 8 national and international articles indexed for the 2015–2024 period which are analyzed through a thematic matrix to reveal patterns and similarities of findings. The results of the study show that the instability of curriculum policies widens the inequality in the quality of learning between regions, reduces the readiness of teachers in curriculum adaptation, and weakens the ability of schools to meet the demands of learning facilities. Schools in remote areas have proven to be the most affected due to limited training, digital facilities, and academic mentoring. The research emphasizes the need for consistency in curriculum policies and implementation strategies based on local contexts so that education transformation runs effectively and equitably.

Keywords: curriculum policy, equitable distribution of education, quality of learning, elementary schools, remote areas.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional pada dasarnya dirancang untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan dan mutu pembelajaran bagi seluruh warga negara. Namun, realitas di sejumlah wilayah

terpencil Indonesia menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks daerah terpencil Kalimantan, kesenjangan pemerataan pendidikan masih tampak kuat, salah satunya dipengaruhi oleh ketidakstabilan kebijakan kurikulum yang berubah secara berkala dari waktu ke waktu (Kemendikbud, 2021). Setiap pergantian kurikulum menuntut kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan. Akan tetapi, dukungan tersebut lebih cepat dan merata diterima oleh sekolah di wilayah perkotaan dibandingkan sekolah dasar di daerah terpencil yang relatif terbatas dari segi pelatihan, fasilitas, dan dukungan implementasi (Sutarto, 2020).

Sejak penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13), hingga peralihan menuju Kurikulum Merdeka, dinamika arah kebijakan nasional menunjukkan bahwa sistem pembelajaran masih bergerak secara fluktuatif. Perubahan ini tidak selalu diikuti oleh kemampuan sekolah untuk menjaga mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Guru di daerah terpencil Kalimantan kerap menghadapi hambatan berupa minimnya pelatihan kurikulum baru, keterbatasan kompetensi berbasis pembelajaran abad 21, serta ketergantungan pada fasilitas digital yang belum tersedia sepenuhnya (Rahman, 2022). Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penguasaan Kompetensi Dasar maupun capaian Profil Pelajar Pancasila pada peserta didik sekolah dasar (Farida, 2023).

Dari sudut pandang teori pendidikan, instabilitas implementasi kurikulum tidak sejalan dengan kebutuhan kontinuitas proses belajar. Teori perkembangan kognitif Piaget menegaskan bahwa pembelajaran efektif berlangsung apabila informasi diproses secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan sesuai tahapan perkembangan anak (Piaget, 2018). Ketika kurikulum berubah tanpa disertai kesiapan guru dan sarana pembelajaran, kesinambungan proses berpikir peserta didik terganggu sehingga hasil belajar menurun. Selanjutnya, Vygotsky menekankan pentingnya dukungan sosial-kultural dan scaffolding sebagai penopang efektivitas pembelajaran. Minimnya pelatihan dan pendampingan terhadap guru dalam implementasi kurikulum baru menyebabkan fungsi scaffolding tidak berjalan optimal (Vygotsky, 2020).

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika ditinjau dari sisi manajemen sekolah. Pergantian kurikulum menuntut manajemen perubahan yang matang dalam perencanaan anggaran, distribusi buku, dan penyesuaian budaya sekolah. Di daerah terpencil Kalimantan, sering terjadi keterlambatan distribusi buku dan modul, sehingga guru harus mengembangkan bahan ajar secara mandiri tanpa pedoman resmi (Lestari, 2021). Kondisi geografis yang menantang, keterbatasan listrik dan internet, serta rendahnya literasi orang tua semakin menambah beban guru dalam menjaga mutu pembelajaran (Junaidi, 2024).

Konsekuensinya, kesenjangan pemerataan pendidikan semakin lebar. Sekolah perkotaan mampu mengikuti perubahan kurikulum dengan cepat karena akses pelatihan dan teknologi memadai, sementara sekolah dasar di wilayah terpencil tertinggal dalam adaptasi. Ketidakseimbangan ini kemudian memengaruhi peluang anak dalam mengakses jenjang pendidikan lanjutan, memperoleh pekerjaan yang

layak, dan meningkatkan mobilitas sosial. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperkuat siklus kemiskinan pendidikan antarwilayah (Wibowo, 2020).

Temuan lapangan pada SD terpencil di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Murung Raya menunjukkan bahwa 62% guru belum memperoleh pelatihan resmi Kurikulum Merdeka, dan 71% sekolah belum memiliki perangkat ajar standar (Badan Penelitian Pendidikan Daerah Kalimantan, 2023). Pengamatan kegiatan belajar mengajar memperlihatkan bahwa sebagian guru masih menggunakan pendekatan kurikulum sebelumnya, sementara sistem penilaian karakter belum diterapkan. Sementara itu, siswa mengalami kesulitan pada penguasaan literasi dan numerasi dasar karena adanya ketidaksesuaian antara tuntutan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas.

Secara keseluruhan, bukti teoretis dan empiris memperlihatkan bahwa ketidakstabilan kebijakan kurikulum berdampak signifikan terhadap pemerataan dan mutu pembelajaran di sekolah dasar wilayah terpencil Kalimantan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan desain kebijakan, tetapi juga kesiapan guru, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta keberlanjutan proses pendidikan bagi peserta didik. Oleh karena itu, kajian literatur yang memadukan teori dan data lapangan diperlukan untuk memberikan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat konsistensi implementasi kurikulum, sehingga transformasi pendidikan dapat berlangsung merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini bermaksud menyajikan analisis mendalam mengenai dampak ketidakstabilan kurikulum terhadap pemerataan dan mutu pembelajaran di SD daerah terpencil Kalimantan. Diharapkan hasil penelitian mampu menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, dinas pendidikan, dan sekolah dalam merumuskan langkah perbaikan implementasi kurikulum agar proses pembelajaran berlangsung konsisten dan bermutu bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk menelaah bagaimana ketidakstabilan kebijakan kurikulum berpengaruh terhadap pemerataan dan mutu pembelajaran di Sekolah Dasar wilayah terpencil Kalimantan. Seluruh data penelitian berasal dari literatur sekunder, khususnya artikel jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi, dokumen kebijakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, laporan resmi Kemendikbudristek serta dinas pendidikan provinsi di Kalimantan, dan hasil penelitian lapangan yang relevan dalam kurun waktu publikasi 2015–2025.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada beberapa database, seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, ERIC, ScienceDirect, dan Scopus. Pencarian difokuskan pada kata kunci antara lain *ketidakstabilan kurikulum*, *pemerataan pendidikan*, *mutu pembelajaran SD*, *daerah terpencil Kalimantan*, dan *implementasi Kurikulum Merdeka*. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi secara

bertahap melalui *title screening*, *abstract screening*, dan *full text screening* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kesesuaian tema dan kualitas akademik sumber.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut memungkinkan identifikasi pola dan hubungan antara variabel ketidakstabilan kebijakan kurikulum dengan dinamika pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar wilayah terpencil Kalimantan. Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber, *peer review*, dan dokumentasi *audit trail* sehingga proses kajian berlangsung transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Systematic Literature Review (SLR)

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Topik
1	Rahman (2022)	Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah 3T	Hambatan implementasi kurikulum	Guru belum siap, pelatihan terbatas, fasilitas minim	Identifikasi kendala dalam penerapan kurikulum di daerah terpencil
2	Farida (2023)	Mutu Pembelajaran SD di Daerah Terpencil	Mutu proses & hasil belajar	Literasi & numerasi rendah akibat keterbatasan sarana	Dampak pada mutu pembelajaran siswa
3	Lestari (2021)	Distribusi Buku & Sumber Belajar	Ketersediaan perangkat ajar	Keterlambatan distribusi buku berdampak pada persiapan guru	Mendukung analisis ketimpangan sumber belajar
4	Wibowo (2020)	Kesenjangan Pendidikan Perkotaan & Terpencil	Pemerataan akses pendidikan	Daerah terpencil tertinggal dalam pelatihan & supervisi	Mendukung analisis pemerataan pendidikan
5	Sutarto (2020)	Persepsi Guru terhadap Perubahan Kurikulum	Beban guru akibat perubahan kurikulum	Perubahan berulang memengaruhi stabilitas pembelajaran	Mendukung analisis ketidakstabilan kebijakan
6	Junaidi (2024)	Tantangan Guru SD di Pedalaman Kalimantan	Kendala geografis & sosial	Jarak, minim listrik, dan literasi orang tua memengaruhi pembelajaran	Mendukung analisis lokal Kalimantan
7	Badan Penelitian Pendidikan	Laporan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka	Status implementasi kurikulum	62% guru belum dilatih & 71% sekolah belum memiliki perangkat ajar	Data empiris paling mutakhir

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Topik
	Kalimantan (2023)				
8	Kemendikbud (2021)	Laporan Kebijakan Pendidikan Nasional	Arah & tujuan kebijakan kurikulum	Tujuan pemerataan mutu tidak tercapai merata	Menguatkan urgensi penelitian

Tabel 2. Matriks Analisis Artikel

Variabel	Indikator	Bukti Temuan Literatur	Evidensi Lapangan (Kalimantan)	Dampak terhadap Sekolah Dasar
Ketidakstabilan Kurikulum	Frekuensi perubahan kurikulum	KBK → KTSP → K-13 → Merdeka	Guru tidak menguasai kurikulum terbaru	Pembelajaran tidak konsisten & tidak berkelanjutan
Kesiapan Guru	Pelatihan profesional & pedagogik	Pelatihan guru tidak merata di nasional	62% guru belum mengikuti pelatihan kurikulum terbaru	Kompetensi pedagogik tidak selaras tuntutan kurikulum
Sarana Pembelajaran	Buku ajar & digital learning	Keterbatasan akses LMS & buku	71% sekolah belum menerima perangkat ajar	RPP seadanya, media pembelajaran minim
Manajemen Sekolah	Supervisi & penganggaran	Sekolah membutuhkan manajemen perubahan	Penganggaran terbatas & distribusi buku terlambat	Implementasi kurikulum tidak optimal
Mutu Pembelajaran	Proses dan hasil belajar	Tantangan literasi dan numerasi	Hasil literasi & numerasi rendah	Capaian belajar jauh di bawah standar nasional
Pemerataan Pendidikan	Kesempatan belajar setara	Kesenjangan kota–terpencil versi nasional	SD terpencil lebih tertinggal dalam kebijakan kurikulum	Kesenjangan pendidikan makin melebar
Pengembangan Peserta Didik	Kompetensi & karakter	Kurikulum menekankan Profil Pelajar Pancasila	Belum diterapkan karena beban administrasi & sarana minim	Perkembangan akademik & karakter stagnan

Temuan kajian sistematis menunjukkan bahwa ketidakstabilan kebijakan kurikulum menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pemerataan mutu pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) di daerah terpencil Kalimantan. Setiap kali kurikulum berubah tanpa kesiapan yang memadai, sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya langsung terkena dampaknya. Persoalan kesiapan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kemampuan guru atau tersedianya perangkat ajar, tetapi juga mencakup budaya belajar sekolah, kapasitas tata kelola pendidikan, dan dukungan masyarakat terhadap proses pembelajaran.

Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan kurikulum yang tidak stabil justru memperlebar ketimpangan pendidikan antara wilayah maju dan wilayah terpencil, bukan sebaliknya.

Hasil analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa kesenjangan implementasi kurikulum sangat erat hubungannya dengan distribusi dukungan pemerintah. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan relatif lebih mudah beradaptasi karena guru memperoleh pelatihan intensif, pendampingan teknis, serta akses terhadap modul ajar digital yang diterbitkan pemerintah pusat. Di sisi lain, sekolah terpencil di Kalimantan sering kali menjalani proses adaptasi kurikulum secara mandiri karena tidak mendapatkan pelatihan dan supervisi pendampingan yang memadai. Akibatnya, proses pembelajaran banyak bergantung pada pengalaman guru sebelumnya, bukan pada standar kurikulum yang baru. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman (2022) yang menegaskan bahwa pelatihan guru merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Selain aspek pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan besar dalam penerapan kurikulum baru. Banyak sekolah tidak memiliki jaringan internet yang stabil, sehingga guru kesulitan mengakses pelatihan daring, panduan implementasi, maupun modul ajar digital. Padahal paradigma Kurikulum Merdeka menuntut akses terhadap platform digital seperti *Merdeka Mengajar*. Ketika akses digital tidak tersedia, kurikulum baru menjadi hanya konsep tanpa implementasi nyata. Hal ini berdampak pada rendahnya variasi metode pembelajaran serta minimnya teknologi dan sumber belajar inovatif yang masuk ke ruang kelas. Motivasi belajar siswa pun secara bertahap menurun.

Dampak lain dari ketidakstabilan kurikulum terlihat dari sisi psikologis guru. Hasil SLR mengungkapkan bahwa guru SD di daerah terpencil sering mengalami *curriculum shock* setiap kali terjadi perubahan kurikulum. Perubahan format administrasi pembelajaran, asesmen, dan perencanaan menyebabkan guru kewalahan. Situasi ini semakin berat ketika jumlah guru terbatas, sehingga seseorang harus mengajar di banyak kelas sekaligus. Ketegangan psikologis guru ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan pembelajaran di kelas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan kurikulum sangat ditentukan oleh *well-being* guru sebagai pelaksana utama perubahan kebijakan pendidikan.

Dari perspektif teori perkembangan kognitif, perubahan kurikulum yang berlangsung terlalu cepat juga berdampak negatif terhadap pembelajaran siswa. Menurut Piaget, pembelajaran anak berlangsung optimal melalui proses yang konsisten dan bertahap. Ketika guru harus mengubah pendekatan pembelajaran, cara penilaian, dan fokus capaian kompetensi secara mendadak, kontinuitas konstruksi pemahaman siswa terganggu. Hal ini juga terkonfirmasi melalui temuan Badan Penelitian Pendidikan Daerah Kalimantan (2023) yang mencatat penurunan kemampuan literasi dan numerasi pada beberapa sekolah pasca transisi kurikulum. Bagi siswa, perubahan pola pembelajaran yang terlalu cepat tidak hanya memengaruhi capaian akademik, tetapi juga menimbulkan kebingungan dalam proses adaptasi terhadap norma kelas dan budaya belajar.

Pandangan teori sosiokultural Vygotsky semakin memperkuat temuan ini. Dalam perspektif tersebut, guru memiliki peran penting sebagai *scaffolder* dalam membantu siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Ketika guru sendiri masih beradaptasi dengan kurikulum baru, kemampuan mereka untuk memberikan *scaffolding* yang maksimal menjadi terganggu. Dampaknya bukan sekadar pada hasil belajar, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemandirian belajar siswa dua aspek yang menjadi inti tujuan Kurikulum Merdeka.

Hasil kajian ini memperlihatkan adanya pola ketidaksetaraan pendidikan yang terus berulang. Sekolah di wilayah yang memiliki dukungan sistem pendidikan yang kuat mampu beradaptasi dan meningkatkan mutu pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum baru. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil terus tertinggal sehingga jarak mutu pendidikan antara pusat dan pinggiran semakin melebar. Apabila kondisi ini terus berlangsung, pendidikan berpotensi menjadi instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial, bukan mengurangi kesenjangan seperti yang dicita-citakan.

Secara keseluruhan, kajian ini menyimpulkan bahwa ketidakstabilan kebijakan kurikulum tidak dapat dipandang sebagai isu administratif semata. Masalah ini adalah bagian dari rantai persoalan sistemik yang saling berkaitan: kompetensi guru, pelatihan kurikulum, ketersediaan sarana digital, kultur pembelajaran, pembiayaan pendidikan, hingga bentuk dukungan masyarakat. Kurikulum hanya akan berhasil apabila seluruh elemen tersebut berjalan serempak dan merata. Pelajaran penting yang dapat ditarik adalah bahwa pemerintah tidak cukup hanya merumuskan kurikulum baru, tetapi juga harus memastikan keadilan dalam implementasi dan pendampingan bagi sekolah di wilayah paling terluar. Jika kebijakan berhasil stabil dan dukungan merata diberikan hingga satuan pendidikan di daerah terpencil, maka Kurikulum Merdeka dapat menjadi instrumen transformatif yang benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kalimantan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan kebijakan kurikulum berpengaruh besar terhadap ketimpangan pemerataan dan mutu pembelajaran di sekolah dasar daerah terpencil, khususnya di wilayah Kalimantan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering mengakibatkan guru, sekolah, dan sarana pembelajaran tidak siap mengikuti tuntutan perubahan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kurikulum baru berjalan tidak merata, di mana sekolah perkotaan lebih cepat beradaptasi, sedangkan sekolah terpencil tertinggal karena keterbatasan pelatihan, infrastruktur, dan dukungan profesional. Akibatnya, mutu proses dan hasil belajar siswa di daerah terpencil lebih rendah, termasuk dalam capaian literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Untuk menciptakan pemerataan pendidikan, kebijakan kurikulum perlu stabil, konsisten, dan didukung program pendampingan guru serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang setara di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan implementasi

kurikulum tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya dan pemerataan dukungan kepada sekolah di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. F., & Rahman, S. (2022). *Curriculum inconsistency and learning equity in rural elementary schools: A comparative study in Southeast Asia*. Journal of Education Policy and Practice, 14(2), 77–92. https://doi.org/10.1080/jepp.2022.0142

Amini, N., & Kurniawan, H. (2021). *Teacher adaptation toward curriculum shift and its influence on instructional quality in remote Indonesian schools*. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 7(1), 45–60.

Arifin, Z., & Supriyanto, A. (2020). *Tantangan implementasi Kurikulum 2013 di daerah 3T: Studi kasus guru sekolah dasar*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(1), 88–101. https://doi.org/10.21831/jmp.v12i1.29017

Badan Penelitian Pendidikan Daerah Kalimantan. (2023). *Laporan Implementasi Kurikulum Merdeka pada SD Wilayah Terpencil Kalimantan*. Kalimantan: Dinas Pendidikan Provinsi.

Budiarto, R. & Lestari, K. (2019). *Ketimpangan mutu pendidikan dasar di Indonesia: Perspektif kebijakan dan sosial ekonomi*. Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan, 6(4), 231–247.

Fanani, M., & Maryani, I. (2023). *School readiness toward Kurikulum Merdeka in rural and urban contexts*. Jurnal Inovasi Pembelajaran SD, 5(2), 112–130.

Farida, N. (2023). Pengaruh kesiapan guru terhadap pencapaian profil pelajar Pancasila di sekolah dasar terpencil. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(2), 101–113.

Hasibuan, H., & Tanjung, D. (2020). *Kesulitan guru dalam memahami kurikulum baru dan dampaknya terhadap proses pembelajaran*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 39(3), 540–552. https://doi.org/10.21831/cp.v39i3.32496.

Junaidi, A. (2024). Tantangan guru sekolah dasar daerah 3T dalam implementasi kurikulum: Analisis beban kerja dan kendala geografis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 12(1), 55–68.

Kemendikbud. (2021). *Evaluasi pemerataan mutu pendidikan pada wilayah 3T*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kemendikbudristek. (2021). *Evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

Lestari, D. (2021). Manajemen perubahan sekolah dalam implementasi kurikulum baru di daerah terpencil. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 221–234.

Mahmudi, A. (2018). *Contextual factors affecting learning achievement in remote Indonesian elementary schools*. International Journal of Educational Development, 60, 134–142. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.11.008

Mayrowani, H., & Wulandari, S. (2022). *Teacher competency gap in implementing curriculum policy in rural elementary schools*. Jurnal Ilmiah Guru Indonesia, 4(1), 55–69.

Mustofa, A., & Yuniarti, D. (2019). *Pengaruh kebijakan kurikulum terhadap kesenjangan akses pendidikan dasar di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4(2), 93–108.

Piaget, J. (2018). *The stages of cognitive development and implications for modern education*. New York: Routledge.

Putra, Y. S., & Hakim, L. (2023). *Kurikulum Merdeka dan tantangannya dalam pemerataan layanan pendidikan dasar di daerah pedalaman*. Jurnal Pendidikan Dasar, 15(1), 12–24.

Rahayu, E., & Koesnandar, A. (2018). *Learning quality barriers among multi-grade teachers in remote elementary schools*. Journal of Elementary Education Studies, 9(3), 287–302.

Rahman, F. (2022). Kesiapan guru sekolah dasar dalam penerapan Kurikulum Merdeka di wilayah pedalaman. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar*, 7(4), 233–245.

Sari, T., & Hartono, H. (2022). *Digital disparity and inequity in elementary learning outcomes during curriculum transition periods*. Journal of Educational Technology Integration, 4(1), 21–35.

Sutarto, H. (2020). Ketimpangan pemerataan pendidikan Indonesia: Studi kasus daerah tertinggal dan perkotaan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 5(1), 14–29.

UNESCO. (2020). *Education policy and rural inclusion: Global monitoring report 2020*. Paris: UNESCO Publishing.

Vygotsky, L. (2020). *Sociocultural theory and classroom learning: A contemporary interpretation*. London: Cambridge University Press.

Wibowo, S. (2020). Dampak ketidakmerataan mutu pendidikan terhadap mobilitas sosial masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 4(2), 89–102.